

**Judul** : Sensus ekonomi 2026, legislator minta BPS potret usaha digital  
**Tanggal** : Kamis, 29 Januari 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

Sensus Ekonomi 2026

## Legislator Minta BPS Potret Usaha Digital

ANGGOTA Komisi X DPR Ratih Megasari Singkarru meminta Badan Pusat Statistik (BPS) menangkap gambaran perekonomian nasional di sektor digital dan informal dalam Sensus Ekonomi 2026. Karena, perputaran ekonomi saat ini semakin banyak terjadi di ruang-ruang yang tidak kasatmata dan tidak berbasis usaha fisik konvensional.

Jika metodologi sensus tidak adaptif, sebagian besar aktivitas ekonomi baru berpotensi tidak tercatat secara memadai. "Kita khawatir banyak perputaran ekonomi sekarang yang tidak terlihat, seperti *influencer*, *content creator*, *freelancer*, atau *cloud kitchen*, luput dari pendataan," ujar Ratih di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Legislator Fraksi Partai Nas-Dem itu menegaskan, sensus tidak boleh hanya bertumpu pada toko, kantor, atau unit usaha fisik yang mudah diidentifikasi di lapangan. Karena pada dasarnya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia berlangsung sangat masif dan lintas platform.

Karena itu, dia ingin memastikan metode pendataan BPS bisa menangkap pelaku ekonomi yang fleksibel dan tidak memiliki alamat usaha tetap. Karena jika masih memakai cara lama, sensus dikhawatirkan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Padahal sensus ini bertujuan mencatat perubahan ekonomi dalam 10 tahun terakhir.

"Terutama dengan menguatnya ekonomi digital, *platform* digital, dan kerja lepas yang jadi sumber penghidupan jutaan warga," ucapnya.

Selain tantangan metodologi, Ratih juga menyoroti potensi beban ganda yang akan dihadapi petugas sensus di lapangan. Petugas tidak hanya melakukan pencacahan usaha, tapi juga mengumpulkan data individu dan keluarga melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kondisi itu, sambung Ratih, berisiko membuat petugas kelelahan dan meningkatkan kesalahan pencatatan di lapangan. Karenanya, BPS perlu memberi perhatian serius pada kesiapan sumber daya manusia, terutama melalui pelatihan yang matang agar

target pendataan tercapai tanpa mengorbankan keakuratan data.

Dia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas data, agar hasil sensus benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi nasional secara akurat. "Kualitas data menjadi fondasi utama kebijakan publik," ucapnya.

Ratih memandang, Sensus Ekonomi 2026 sebagai momentum krusial untuk memotret ekonomi digital dan informal yang kini menjadi tulang punggung pertumbuhan nasional. Harapannya, BPS mampu menyesuaikan metodologi dan strategi lapangan agar seluruh segmen ekonomi dapat tercatat.

Sejalan dengan itu, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menegaskan, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya ditentukan kekuatan metodologi statistik. Selain metode, strategi komunikasi publik yang berlapis dan membumi jadi faktor penentu partisipasi masyarakat.

Karena itu, persiapan sensus masih perlu diperkuat, khususnya dalam membangun kepercayaan publik agar tidak muncul sikap apatis. Sensus harus dipahami sebagai agenda bersama, bukan sekadar urusan teknokratis. Makanya, gelaran ini harus melibatkan seluruh masyarakat.

"Strateginya tidak boleh elitis, tapi tetap realistis mengingat keterbatasan anggaran. Kuncinya ada pada kepercayaan publik," kata Hetifah dalam keterangannya, Rabu (28/1/2026).

Politikus Partai Golkar itu mendorong BPS mengoptimalkan komunikasi yang dekat dengan keseharian masyarakat, terutama terhadap para pelaku UMKM dan ekonomi sektor informal lainnya. Pemanfaatan tokoh lokal dan media komunitas juga bisa jadi langkah strategis mencapai tujuan sensus.

Kata dia, pelibatan RT, RW, karang taruna, ibu-ibu pengajian, komunitas pasar tradisional, hingga pemanfaatan grup WhatsApp, radio komunitas, dan media lokal bisa memperkuat jangkauan sensus. Bahkan tak tertutup kemungkinan membuka pembentukan posko sensus di tingkat desa.

"Agenda ini harus jadi ruang rakyat untuk bersuara melalui data, yang kelak kembali kepada mereka dalam bentuk kebijakan yang adil dan berpihak," tegasnya.

Selanjutnya, dia menyoroti pentingnya fase pasca-sensus, khususnya transparansi hasil dan diseminasi data dalam bahasa yang mudah dipahami publik. Hal ini krusial untuk menjaga legitimasi BPS dan merawat kepercayaan masyarakat.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, pihaknya akan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan geotagging dalam pendataan lapangan. Pencacahan akan berlangsung selama sekitar 2,5 bulan, mulai pertengahan Mei hingga 31 Juli 2026.

Selain itu, BPS juga akan memanfaatkan teknologi tersebut untuk membantu petugas dalam mengklasifikasikan jenis usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Pendekatan ini ditujukan untuk meminimalkan kesalahan klasifikasi di lapangan.

"Teknologi AI akan membantu petugas menentukan klasifikasi lapangan usaha, sehingga potensi kesalahan dalam pengelompokan jenis usaha dapat ditekan," terang Amalia.

Untuk perusahaan besar, BPS akan menggunakan kuesioner digital. Kuesioner daring akan dikirimkan mulai awal Mei, agar perusahaan memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan data yang dibutuhkan. Karena perusahaan besar biasanya memerlukan waktu lebih lama untuk mengisi kuesioner.

Lebih lanjut, sensus kali ini akan melibatkan sekitar 251 ribu petugas dari seluruh Indonesia. Proses rekrutmen petugas akan dilakukan pada Februari hingga Maret 2026, disusul pelatihan dan pengadaan instrumen pendataan hingga April. BPS juga menyiapkan perlindungan bagi petugas melalui asuransi jaminan kerja dan jaminan kematian.

"Kami bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan seluruh petugas mendapatkan perlindungan selama masa penugasan," tutupnya. ■ PYB